



Judul	: Usul Kader PAN Menyakiti Perasaan Publik
Tanggal	: Jumat, 09 Juli 2021
Surat Kabar	: Media Indonesia
Halaman	: 3

Usul Kader PAN Menyakiti Perasaan Publik

PARTAI Amanat Nasional (PAN) memberikan teguran kepada Wakil Sekjen PAN Rosaline Irene Rumaseuw yang mengusulkan pengadaan rumah sakit (RS) khusus pejabat negara.

"DPP PAN telah memberikan teguran kepada dokter Rosaline atas pernyataannya yang bersifat pribadi di acara webinar tentang perlunya rumah sakit khusus pejabat," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Viva Yoga Mauladi kepada *Medcom.id*, kemarin.

Viva menegaskan pernyataan Rosaline merupakan pendapat pribadi. Usul itu dinilai atas dasar perasaan sedih. PAN menilai usul Rosaline tak tepat dan bertentangan dengan Pasal 28H

UUD 1945, yang menyatakan setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Senada dengannya, Wasekjen DPP PAN Irvan Herman mengatakan pernyataan Rosaline merupakan sikap pribadi dan bukan sikap partai. "Kami juga kaget tiba-tiba yang bersangkutan mengusulkan rumah sakit khusus pejabat. Itu usul perasaan Rosaline karena John Mirin, anggota Fraksi PAN DPR RI (mendapatkan) penanganan yang terlambat di rumah sakit, akhirnya wafat," katanya.

Irvan menjelaskan sikap PAN menghadapi pandemi covid-19 jelas dan terang, yakni seluruh kader PAN harus turun lang-

sung membantu rakyat yang kesulitan. "Justru usul PAN adalah bagaimana caranya rakyat dapat fasilitas rumah sakit kelas pejabat. Jangan membeda-bedakan fasilitas kesehatan," lanjutnya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Fraksi Nasdem Willy Aditya menekankan DPR harus mendukung langkah pemerintah mengendalikan laju penularan covid-19. "Usul yang disampaikan untuk membangun RS khusus bagi pejabat negara saya kira berlebihan dan akan menyakiti perasaan publik. Bukan saat ini mengusulkan hal yang justru membangun jurang pemisah," ungkapnya.

Menurut Willy, ada banyak

cara agar masyarakat termasuk anggota DPR terlindungi dari pandemi, selain menuntut pendirian RS eksklusif.

Di sisi lain, anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta semua pihak fokus membantu pemerintah dan jangan berkomentar kontrapunktif.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menegaskan yang dibutuhkan Indonesia saat ini ialah penambahan kapasitas tempat tidur rumah sakit (RS). Dia menilai usul RS khusus bagi pejabat diskriminatif. Usul itu dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. (Sru/Cah/P-5)